



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUMATERA UTARA (BKAD)

Ahmad Fadil Nouval^{1*}, Rahmat Daim Harahap², Yenni Samri Julianti Nasution³

^{1*}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Ahmadnouval2001@gmail.com^{1*}, rahmaddaimharahap@uinsu.ac.id², yenni.samri@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness of Fixed Asset Accounting Systems and Procedures at the Regional Finance and Asset Agency of North Sumatra Province. The method used in this research is qualitative with descriptive analysis, with data collection techniques through interviews and documentation. The results of this study are the implementation of the Fixed Asset Accounting System in BKAD is effective and efficient because Fixed Asset Management is well recorded through an application called Si Anak Dara Sumut. This application is very helpful for employees in processing data so that it can present clear information. The implementation of Fixed Asset Accounting Procedures in BKAD has been running effectively. There are a series of computerized processes starting from recording and reporting accounting for the acquisition, to maintenance, rehabilitation, deletion, alienation, change in classification, and depreciation of assets.

Keywords: Accounting Procedures, Effectiveness, Fixed Asset, Regional Financial Accounting System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap pada BKAD sudah efektif dan efisien karena Pengelolaan Aset Tetap tercatat dengan baik melalui aplikasi yang bernama Si Anak Dara Sumut. Aplikasi ini sangat membantu pegawai dalam mengolah data sehingga dapat menyajikan informasi yang jelas. Penerapan Prosedur Akuntansi Aset Tetap di BKAD telah berjalan dengan efektif. Terdapat serangkaian proses yang terkomputerisasi mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset.

Kata Kunci: Aset Tetap, Efektivitas, Prosedur Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Perubahan paling signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan cakupan kinerja terjadi sebagai hasil dari peralihan dari sistem pemerintahan yang mengubah sistem menjadi lebih otonom bagi daerah adalah esensi dari konsep desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri, yang didasarkan pada keinginan dan harapan masyarakat dalam konteks kesatuan negara Republik Indonesia.

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan otonomi daerah adalah manajemen aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset ini, termasuk manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah harus bertanggung jawab atas manajemen keuangan mereka, yang merupakan landasan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah harus menunjukkan kinerja yang baik, yang tercermin dalam setiap kegiatan yang diharapkan menghasilkan sistem dan prosedur akuntansi aset yang optimal. Ini berlaku untuk semua sektor, baik sektor swasta maupun sektor publik.

Dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih baik dalam mengembangkan dan meningkatkan wilayah mereka secara mandiri, serta memanfaatkan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya lokal, termasuk pajak. Pengelolaan pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak sesuai dengan hukum, dan ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pemerintahan (Siregar dan Kusmilawaty, 2022).

Pentingnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diatur oleh hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Panduan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemerintah berusaha untuk memodernisasi pengelolaan aset daerah dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku memberikan pedoman untuk tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset tetap daerah. SAP membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi. Meskipun SAP memberikan pedoman, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Setiap daerah mungkin memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda-beda, termasuk pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap (R. Anggraini, 2018).

Manajemen aset tetap adalah tugas yang kompleks, terutama karena karakteristik yang berbeda dari setiap jenis aset. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah, khususnya aset tetap, merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus menjalankan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku, karena ini adalah faktor penting dalam pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Harahap, 2022)

Untuk memudahkan pengelolaan aset daerah, pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah diubah menjadi sistem komputerisasi sejak tahun 2015. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang disediakan oleh provinsi dengan nama Si Anak Dara Sumut. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola aset daerah dengan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan audibilitas.

Namun, hasil wawancara dengan seorang pegawai BKAD Kota Medan mengungkapkan bahwa masih ada kendala terkait status bangunan yang belum jelas sejak tahun 2019. BKAD masih belum memiliki gedung tetap sebagai kantor mereka dan selama ini mereka harus menyewa gedung dari dinas daerah. Pada tahun 2019-2022, mereka menyewa satu lantai di Gedung Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol, dan pada tahun 2022 hingga saat ini, mereka pindah dan menyewa kembali di Kantor Dinas Perhubungan di Jalan Polonia. BKAD Provinsi Sumut berencana membangun gedung mereka sendiri di sebelah Kantor Gubernur, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2025. Selain itu, masih ada aset tetap seperti komputer yang perlu dihapuskan karena rusak berat, serta beberapa perangkat lain yang belum diganti. Dalam situasi seperti ini, penting untuk segera melaksanakan penghapusan sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Ketika kita berbicara tentang biaya, ini merujuk pada penilaian aset berdasarkan pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh entitas untuk memperoleh aset tetap hingga saat aset tersebut dapat digunakan sepenuhnya. Sedangkan dalam konteks penyusutan, ini berarti bahwa aset tetap akan mengalami pengurangan nilai setiap tahunnya sesuai dengan masa manfaat yang telah ditentukan. telah ditentukan (Salahudin, 2020).

Oleh karena itu, diharapkan agar pegawai BKAD Provinsi Sumatera Utara terus berusaha memperbaiki dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola Pengelolaan aset atau barang yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Utara bukan hanya akan menghasilkan tata kelola aset yang optimal, tetapi juga akan merangsang pemanfaatan potensi aset guna meningkatkan efektivitas kerja (Fadli, 2021).

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengambil studi tentang, "Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Utara (BKAD)"

KAJIAN LITERATUR

Efektivitas

Efektivitas merujuk pada hubungan antara hasil yang dicapai dan tujuan yang ditetapkan, atau dapat digambarkan sebagai metrik untuk menilai sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur dalam suatu organisasi telah tercapai. Hal ini juga berkaitan dengan menilai tingkat kesuksesan operasi dalam perusahaan, sehingga suatu kegiatan dianggap berhasil jika memberikan dampak yang penting dalam penyediaan pelayanan publik yang baik. Efektivitas digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Jika Ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Indikator efektivitas mencerminkan hasil dan dampak yang dihasilkan oleh program dalam mencapai tujuan program tersebut. Semakin besar kontribusi output program terhadap pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan, semakin efisien proses kerja tersebut. dalam sebuah unit organisasi (Agusti dan Mahmuda, 2021).

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana sebuah proses atau unit mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari proses tersebut, maka semakin meningkat juga semakin efektif dianggap proses tersebut. Efektivitas bisa diukur melalui hubungan antara hasil yang dihasilkan oleh suatu entitas dengan tujuan Hal yang harus ia mencapai. Semakin besar sumbangan hasil terhadap pencapaian tujuan tersebut, semakin signifikan maka semakin efektif unit tersebut dianggap. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana pekerjaan dilakukan dengan baik Dan sejauh mana seseorang dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Efisiensi sistem bergantung pada partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan, kualitas informasi akuntansi, penilaian kinerja, dan juga kontrol internal yang memfasilitasi transaksi perusahaan. Implementasi pengendalian ini melibatkan penggunaan akuntansi pertanggungjawaban, yang melibatkan pengelompokan tanggung jawab dan pengukuran dengan jelas hubungan antara berbagai bagian dalam perusahaan, serta pertanggungjawaban yang rinci untuk setiap tingkatan (Kemuning, 2018).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri atas serangkaian tindakan yang diawali dengan pendataan dan pencatatan, pengelompokan, hingga ringkasan transaksi atau peristiwa keuangan, serta pelaporan keuangan untuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3). Hal ini dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam Laporan Keuangan daerah yang diatur oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat beberapa komponen, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian integral dari akuntansi secara keseluruhan, dan oleh karena itu, dalam akuntansi keuangan daerah, terdapat langkah-langkah seperti identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan

yang terjadi di pemerintah daerah. Terdapat berbagai sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam konteks ini. Secara keseluruhan, sistem akuntansi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat prosedur akuntansi, yaitu Single Entry, Double Entry, dan Triple Entry. (Br Purba dan Mendina Amrul, 2018).

“Sistem akuntansi keuangan pada dasarnya adalah sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan suatu entitas,” demikian pernyataan Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Kementerian Keuangan RI. Intinya adalah menciptakan data moneter yang dapat dijadikan alasan dinamisasi oleh individu-individu yang terlibat erat (Erni, 2018).

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Asset/ Barang Milik Negara

Pengelolaan aset atau barang yang dimiliki oleh negara atau daerah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007, khususnya pasal 4. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Prinsip-prinsip ini mencakup sejumlah kegiatan, seperti:

- 1) Perencanaan kebutuhan dan anggaran.
- 2) Proses pengadaan.
- 3) Penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang.
- 4) Penggunaan barang.
- 5) Administrasi dan pencatatan.
- 6) Pemanfaatan barang.
- 7) Upaya pengamanan dan pemeliharaan.
- 8) Penilaian nilai barang.
- 9) Penghapusan barang.
- 10) Pemindahan kepemilikan.
- 11) Pengawasan dan pengendalian.
- 12) Pengaturan pembiayaan.
- 13) Penanganan tuntutan ganti rugi (Kemuning, 2018).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan komponen organisasi yang membantu dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dengan cara melaporkan hasilnya. Kebijakan dan prosedur sistem akuntansi keuangan daerah, aspek sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi semuanya termasuk dalam ruang lingkupnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kerangka pembukuan moneter lokal bekerja secara produktif, maka hasilnya akan berupa laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Kerangka pembukuan moneter provinsi pada dasarnya mempengaruhi sifat laporan moneter. Pada akhirnya, dengan asumsi bahwa kerangka moneter teritorial dijalankan dengan baik, laporan moneter selanjutnya akan lebih baik. Pengukuran, pencatatan, dan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai keterkaitan yang erat, klasifikasi, dan pelaporan akuntansi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam periode tertentu. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hasil laporan keuangan akan menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang tinggi (Defitri, 2018).

Prosedur-prosedur Akuntansi

1) Prosedur-prosedur Akuntansi

- a) Teknik pembukuan gaji adalah serangkaian langkah yang dilakukan baik secara fisik maupun dengan bantuan PC, mulai dari pencatatan, penjumlahan, hingga pengungkapan keuangan yang berkaitan dengan pertukaran dan penyimpanan gaji. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk melaporkan penggunaan anggaran dalam APBD dengan tepat.
- b) Prosedur akuntansi belanja merupakan serangkaian langkah baik yang dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer, dimulai dari pencatatan transaksi dan pengikhtisarannya hingga pelaporan keuangan yang berkaitan dengan belanja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Proses akuntansi belanja di SKPD melibatkan prosedur dengan UP/GU, TU, dan Ls.

- c) Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian langkah baik yang dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer, diawali dengan pencatatan akuntansi dan laporan mengenai perolehan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi aset, dan pengurangan aset SKPD. Terdapat tata cara aset tetap dan aset lainnya dalam proses akuntansi aset SKPD. Proses akuntansi aset tetap adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencatat dan melaporkan belanja modal sebagai aset tetap di neraca. Sedangkan prosedur akuntansi aset lainnya adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk mencatat dan melaporkan transaksi yang terkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya secara konsisten di neraca.
- d) Prosedur akuntansi non kas mengacu pada transaksi yang memiliki nilai ekonomi tetapi tidak melibatkan uang tunai. Transaksi non kas bisa terjadi sebagai hasil dari transaksi kas, namun tidak melibatkan uang tunai dalam prosesnya (Dwitayanti dan Zahara, 2019)

Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap merupakan jenis sumber daya yang tidak akan mudah diubah menjadi uang tunai selama keberadaan fungsional suatu bisnis. Klasifikasi sumber daya modal ini mencakup bangunan, peralatan, dan tanah atau properti aktual yang digunakan dalam kegiatan bisnis, namun tidak diharapkan atau diantisipasi. akan segera dikonversi menjadi uang dalam rangka menjalankan bisnis. Ini adalah keadaan yang biasa terjadi dalam bisnis (T. Anggraini dan Syafina, 2022).

Sumber daya akan menjadi aset yang dibatasi oleh suatu substansi karena kejadian di masa lalu, dan dari sumber daya tersebut diyakini keuntungan finansial akan mengalir ke elemen tersebut di kemudian hari. Hal ini mengacu pada aset yang dimiliki oleh organisasi dan seharusnya memberikan keuntungan finansial mulai sekarang (Future Monetary Advantage). Kemampuan aset untuk memberi manfaat bagi bisnis di masa depan adalah kualitas utamanya. Sumber daya tetap merupakan sumber daya yang penting bagi suatu organisasi yang mempunyai struktur aktual, diperoleh dengan tekad untuk digunakan dalam tugas bisnis organisasi, tidak tersedia untuk dibeli, dan dapat memberikan keuntungan finansial dalam jangka panjang. Aktiva tetap juga menjadi subjek dari proses depresiasi atau penyusutan (Yusuf, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghimpun, menganalisis, dan memahami secara mendalam. data kualitatif atau data deskriptif yang dihasilkan dari interaksi manusia, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman manusia, pandangan, persepsi dan makna yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Alamat Jalan Imam Bonjol No. 61, Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi ini dipimpin oleh seorang Ketua Organisasi yang bertanggung jawab merencanakan strategi khusus yang berkaitan dengan para eksekutif Moneter dan Sumber Daya Provinsi. Kewajiban Pimpinan Organisasi meliputi pelaksanaan pengarah, koordinasi, pengawasan, penilaian dan pengendalian Badan Moneter dan Sumber Daya Provinsi. Selain itu, Kepala Badan membantu penyelenggaraan Pemerintahan dan menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud di atas, Organisasi ini melakukan berbagai kemampuan, khususnya:

- 1) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah mengenai pengelolaan uang dan kekayaan daerah, anggaran, dan perbendaharaan.
- 2) Mengendalikan pengolahan data dalam rangka menyempurnakan dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan standar pengelolaan aset.
- 3) Mengarahkan dan melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah.
- 4) Memberikan bantuan pengelolaan aset dan keuangan daerah

- 5) Menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh perwakilan Pemimpin, sesuai dengan kewajiban dan elemen Organisasi ini.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kepala Badan memiliki tanggung jawab yang meliputi:

- 1) Kepala Daerah menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Mempersiapkan dan memutuskan proyek kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan Dewan Moneter dan Sumber Daya Lokal, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai bantuan dalam melakukan usaha.
- 3) Menetapkan aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 4) Merencanakan dan menyetujui Catatan Pelaksanaan Rencana Belanja (DPA) untuk Satuan Kerja Kewilayahan (SKPD) dan Berita Acara Pelaksanaan Perolehan (DPPA) untuk SKPD.
- 5) Mengawasi pelaksanaan APBD.
- 6) Menumbuhkan pedoman khusus untuk melaksanakan kerangka penerimaan dan pembayaran uang provinsi.
- 7) Menyusun Surat Permintaan Pembangunan (SPD) yang dihubungkan dengan dana daerah.
- 8) Mengelola pinjaman dan menyediakan pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 9) Mengembangkan kerangka pembukuan dan perincian moneter provinsi.
- 10) Menyajikan data moneter teritorial secara lugas dan tepat.
- 11) Menetapkan peraturan dan kebijakan mengenai cara pengelolaan dan pembuangan barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan di bidang Moneter dan Sumber Daya Provinsi kepada para pelaksana dengan satuan kerja terkait untuk menjamin pelaksanaannya terfokus, terpadu dan mantap.
- 13) Kegiatan pada Badan hendaknya direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 14) Mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil kerja Badan oleh Sekretariat dan Bagian terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
- 15) Mengatur Sekretaris, Kepala Divisi, dan seluruh staf dalam menjalankan kewajibannya, baik sebagai kegiatan preventif maupun restoratif untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam menyelesaikan kewajibannya.
- 16) Menyusun dan mengedarkan pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan Organisasi kepada Sekretaris dan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan kemampuannya masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, aktual, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 17) Untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan instruksi kerja lisan dan tertulis kepada bawahan berdasarkan bidang tanggung jawabnya.
- 18) Kesiapan yang matang dalam organisasi moneter, staf, pengaturan, perangkat keras dan pengendalian organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman, sehingga pelaksanaan usaha berjalan produktif dan sungguh-sungguh.
- 19) Secara lisan dan tertulis memberikan usulan kepada Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 20) Menyelesaikan kewajiban kewenangan lainnya yang berkaitan dengan bidang Pengurus dan Sumber Daya Moneter Daerah, Pejabat Penatausahaan Moneter Wilayah, dan Pendanaan Umum Provinsi yang ditunjuk oleh wakil Pimpinan.

Pejabat perolehan adalah orang perseorangan yang didelegasikan oleh klien tenaga kerja dan produk untuk menyelesaikan cara paling umum dalam memilih pemasok tenaga kerja dan produk dengan perjanjian senilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Barang dagangan mencakup struktur dan penggambaran yang berbeda, termasuk komponen yang belum dimurnikan, produk setengah jadi, barang dagangan jadi, dan perangkat keras, yang penentuannya tidak ditentukan oleh klien atas tenaga kerja dan produk. Administrasi kontrak mengacu pada administrasi untuk melakukan pekerjaan

pengembangan atau kegiatan nyata lainnya, yang mencakup pengaturan khusus yang masih di udara oleh klien atas tenaga kerja dan produk, serta siklus dan pelaksanaan yang dikelola oleh klien atas tenaga kerja dan produk (Susanto, 2019).

Efektivitas Penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumut

Dalam upaya untuk menyederhanakan manajemen aset tetap, proses pelaporan yang sebelumnya manual telah ditingkatkan menjadi sistem yang terkomputerisasi sejak tahun 2015. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara telah mengadopsi sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh provinsi, yang dikenal sebagai "Si Anak Dara Sumut," sebagai alat bantu. Aplikasi ini juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai peraturan terkait pengelolaan aset tetap yang berfokus pada keakuratan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagaimana Penerapan Sistem Aset Tetap yang selama ini telah Dilakukan oleh lembaga keuangan dan manajemen aset di wilayah Sumatera Utara.? Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:

"Pengelolaan Aset Tetap khususnya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. tahun ke tahunnya bisa dilihat dari opini yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meraih predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) sejak tahun 2015 hingga 2023. Prestasi ini dapat dicapai berkat adopsi aplikasi "Si Anak Dara Sumut" yang telah digunakan sejak tahun 2015., aplikasi tersebut sangat membantu SKPD dalam menyajikan laporan aset tetap secara actual dan akuntabel sehingga proses pencatatan dan pelaporan aset dapat berjalan dengan baik setiap tahunnya dan didukung juga dengan sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya".(Ayu, 2023)

Bagaimana kelemahan pencatatan aset saat masih menggunakan aset manual? Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:

Kelemahan dari pencatatan aset saat masih menggunakan aset manual adalah keberadaan aset yang sering tidak ditemukan karena dibawa pulang oleh ASN namun tidak dikembalikan dan pelabelan aset yang masih manual cenderung sulit dan tidak efektif.(Ayu, 2023)

Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Pemprovsumu menciptakan aplikasi ("Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan, dan Pemeliharaan Aset," atau yang dikenal sebagai "Si Anak Dara," Sumut) dengan nama lain SIMBADA ONLINE menyediakan dan mengatur informasi aset mengenai;

- 1) Properti tanah
- 2) Peralatan dan permesinan
- 3) Bangunan dan struktur
- 4) Jaringan jalan, irigasi, dan infrastruktur
- 5) Aset tetap lainnya
- 6) Aset non-fisik

Aplikasi "Perawan Sumatera Utara" (Kerangka Data Organisasi, Keamanan dan Pemeliharaan Sumber Daya Sumut) adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data aset dengan data kepegawaian, termasuk aplikasi SKP online. Sistem ini juga menghadirkan layanan notifikasi terkait informasi pemakai serta riwayat penggunaan aset yang sudah tervalidasi menggunakan QR foto dan label QR code serta lengkap dengan informasi mengenai posisi aset dan masa pemeliharaan yang bisa dilihat dalam bentuk google maps.

Adapun sistem akuntansi aset tetap digunakan pada Organisasi Moneter dan Sumber Daya Teritorial Sumatera Utara, strategi pembukuan sesuai PSAP Nomor 07 tentang Pembukuan Sumber Daya Tetap, yang mengarahkan keadaan dalam mempersepsi suatu sumber daya sebagai berikut:

- a) Dapat digunakan lebih dari satu tahun.
- b) Biaya sumber daya dapat diperkirakan dengan andal.
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal perusahaan.
- d) Diperoleh atau dibuat dengan maksud untuk dimanfaatkan.

Penegasan norma ini berlaku untuk semua unit administrasi yang menyajikan ringkasan fiskal yang bermanfaat secara luas, dan memberikan arahan tentang bagaimana sumber daya tetap harus dipahami, dihargai, diperkenalkan, dan diungkapkan dalam laporan anggaran, kecuali jika ada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah lain yang mewajibkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Efektivitas Penerapan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumut

Dalam rangka mempermudah penerapan prosedur aset yang sebelumnya masih menggunakan cara manual, dan sekarang sudah terbantu dengan adanya aplikasi yang diciptakan sejak tahun 2015 lalu, adapun penerapan Sistem pembukuan Sumber Daya pada Badan Moneter dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang tertuang dalam Pedoman Wilayah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Barang Milik Daerah.

Bagaimana penerapan prosedur akuntansi aset tetap di BKAD Provinsi Sumatera Utara? Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:

“Siklus pengelolaan aset tetap meliputi: Badan Pelayanan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan segala aspek perencanaan kebutuhan dan pengalokasian anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, upaya pengamanan dan pemeliharaan, pengkajian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan barang milik daerah, , antara lain rumah daerah, ganti rugi kerugian, pemilihan saksi, dan penyelesaian sengketa barang milik daerah. (BLAD).”.(Ayu, 2023)

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKAD untuk meminimalisir kesalahan dalam mengelola aset tetap? Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:

“Banyak upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan Salah satu aspek yang berkaitan dengan aset tetap di daerah adalah penerapan manajemen pengelolaan aset tetap. Konsep manajemen aset ini dijelaskan dalam Undang-undang Tidak Resmi Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan koreksi atas Undang-undang Tidak Resmi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Provinsi.”.(Ayu, 2023)

Adakah hambatan dalam melaksanakan prosedur di BKAD Provinsi Sumut? Hasil wawancara penulis kepada pihak BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Ayu Bagian Aset:

Hambatan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Provinsi Sumut yaitu: Penatausahaan aset tidak dilakukan dengan baik, Penggunaan teknologi yang kurang efisien, Kurangnya pemeliharaan rutin terhadap aset, Regulasi yang berubah, Pengawasan dan tanggung jawab yang kurang, Kebijakan prosedur yang kurang baik”.(Ayu, 2023)

Dokumen Sumber adalah semua dokumen penting yang dihasilkan selama proses pengelolaan aset atau dokumen yang menjadi dasar untuk setiap langkah atau tahapan dalam proses tersebut. Dokumen Sumber ini sangat penting karena mereka berfungsi sebagai bukti dalam seluruh proses pengelolaan serta dalam penyusunan laporan keuangan yang memengaruhi total kuantitas dan nilai aset di suatu wilayah. Daftar catatan sumber yang dijadikan acuan untuk menjamin puncak dalam ujian ini dapat dilihat pada Pedoman Pendeta Urusan Rumah Tangga Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Pengurus Harta.

Penerapan Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem pengelolaan aset di BKAD Provinsi Sumut menggunakan aplikasi SI ANAK DARA SUMUT merupakan Sistem Informasi Pengamanan, Pemeliharaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, didalamnya tersistem dan diatur mengenai informasi aset yang dapat diakses Dengan menggunakan opsi yang tersedia dalam aplikasi tersebut.

Penerapan Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Pengelolaan Aset Tetap Di BKAD Provinsi Sumut sudah cukup baik dengan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Pemprov dari tahun 2015 sampai 2023 dalam menyajikan laporan Aset tetap secara actual dan akuntabel sehingga proses pencatatan dan pelaporan aset dapat berjalan dengan baik setiap tahunnya dan didukung juga dengan Sistem Pengendalian Internal dan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya.

Penggunaan Barang Milik Daerah di BKAD Provinsi Sumut diatur dalam pasal 18 tentang Barang Milik Daerah yang mencakup rencana kebutuhan BMD disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, perencanaan juga memperhitungkan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada, yang dipegang oleh pengelola barang atau yang digunakan oleh OPD. Pentingnya aspek ketersediaan ini adalah agar

rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dari OPD, dan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang efektif. kebutuhan BMD.

Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Sistem aset tetap sangat penting bagi keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara karena sistem aset tetap ini sendiri merupakan salah satu alat penting untuk mempermudah dalam pengelolaan aset di BKAD Sumut dan mempercepat laju perekonomian pada Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya dipergunakan dalam menjalankan operasional kinerja untuk tata kelola BKAD Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan sistem aplikasi. Sangat membantu dalam menyajikan laporan aset tetap dan juga didukung dengan sistem pengendalian internal dan pegawai yang ahli dan kompeten dibidangnya.

KESIMPULAN

kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: Penerapan sistem akuntansi aset di BKAD Provinsi Sumatera Utara cukup efektif, terbukti dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didukung dengan inovasi aplikasi SI ANAK DARA yang memudahkan BKAD Provinsi Sumatera Utara dalam mengatur dan memberikan laporan aset yang berguna. Sesuai dengan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 71 Tahun 2010 tentang Norma Pembukuan Pemerintah, sumber daya tetap adalah barang-barang nyata yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan ingin dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh seluruh rakyat.

Penerapan Prosedur di BKAD terdiri dari siklus pengelolaan aktiva tetap, yang meliputi: penyusunan kebutuhan dan rencana pengeluaran peruntukan, perolehan, penggunaan, pemakaian, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, perpindahan kepemilikan, pemusnahan, penghapusan, pencatatan, perbaikan, pengawasan, pengendalian dan penataan sumber daya lokal, yang bersifat diawasi oleh BKAD, termasuk berbagai macam harta kewilayahan seperti struktur pemerintahan, angsuran balas jasa, saksi, dan pengurusan perdebatan yang berkaitan dengan harta milik provinsi. Pasal 18 BKAD Provinsi Sumatera Utara yaitu tentang perencanaan persyaratan barang milik daerah (BMD) dan mengatur penggunaan barang milik daerah, disusun dengan mempertimbangkan persyaratan pelaksanaan.

Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap Salah satunya dipergunakan dalam menjalankan operasional kinerja untuk tata kelola BKAD Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan sistem aplikasi. Sangat membantu dalam menyajikan laporan aset tetap dan juga didukung dengan sistem pengendalian internal dan pegawai yang ahli dan kompeten dibidangnya. Dan juga Manajemen aset atau properti yang dimiliki oleh negara atau daerah, sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Properti Teritorial, dilakukan dengan mengacu pada standar seperti standar kemanfaatan, kejelasan hukum, penerimaan dan keterusterangan, produktivitas, tanggung jawab dan penegasan nilai. yang tetap.

DAFTAR LITERATUR

- Agusti, W. O. D., & Mahmuda, D. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 4(19), 68–87.
- Anggraini, R., Hasanah, N., Fauzi, A., & Utamingtyas, T. H. (2018). Peningkatan Pemahaman Guru-Guru SMK melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintah Guna Menyiapkan SDM Instansi Pemerintah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(2), 338–354. <https://doi.org/10.21009/jpmm.002.2.11>
- Anggraini, T., & Syafina, L. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT Prima Indonesia Logistik Berdasarkan PSAK No 16. *EBMA: EKONOMI BISNIS MANAJEMEN DAN AKUNTANSI*, 3(1), 1–12.
- Ayu. (2023). *Hasil Wawancara*.
- Br Purba, R., & Mendina Amrul, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>
- Dasmaran, V.-, Yulaeli, T.-, & Selfiani, -. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2).

- <https://doi.org/10.28932/jam.v10i2.1082>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2019). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81–96.
- Erni, Gunawan, & Hasmin. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. *YUME : Journal of Management*, 1(2), 131–148.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Harahap, A. S., Harmain, H., & Syafina, L. (2022). Analisis Kepuasan Kerja Karyawan Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamso. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(1), 188–197. <https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.66>
- Kemuning, S. A. (2018). *Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto* (Vol. 87, Issue 1,2). Muhammadiyah Makassar.
- Salahudin, I., Nugroho, G. W., & Kartini, T. (2020). Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Penjualan. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 194–207. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1228>
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Susanto, R. (2019). Sistem Informasi Penyusutan Aset Tetap Di Pt. Xyz. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 8(1), 11–19. <https://doi.org/10.34010/komputa.v8i1.3044>
- Yusuf, A. M., Hasmizal, H., & Dini, N. (2021). Sistem Informasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus Berbasis Vb.Net Pada CV Ginanjar Sejahtera Mandiri Karawang. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 38–45. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.95>